BAB III

GAMBARAN UMUM DAN ANALISA PUTUSAN NOMOR

384/Pdt.G/2021/PA.Mtp

A. Gambaran Umum

1. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat Gugatan nya pada tanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada 7 Juni 2015. Kemudian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi, Tergugat merasa tidak cocok dengan seluruh keluarga Penggugat dan selalu merendahkan keluarga Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan talak/pisah dan pernah didengar oleh kakak kandung Penggugat.

Pada sekitar bulan Mei atau bulan puasa 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- c. Menetapkan hak asuh anak yang masih mumayyiz kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kasih sayang Tergugat kepada anak;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Penggugat dan Tergugat telah datang dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak;

kemudian untuk memaksimalkan usaha perdamaian dilakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator tetapi juga tidak berhasil, kecuali masalah hadanah disepakati dicabut;

Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa “Benar” Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah;
- b. Bahwa “Benar” Tergugat dan Penggugat pernah mengontrak di Kota Rantau dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun dan Penggugat ikut dengan Tergugat di *mess* perusahaan daerah Sungai Danau;
- c. Bahwa “Tidak Benar” apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata – kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat dan Penggugat dari awal pernikahan memang terpisah tempat tinggal dikarenakan posisi pekerjaan Tergugat yang sering berpindah-pindah tugas keluar daerah;
- e. Bahwa “Tidak Benar” Tergugat dan Penggugat berpisah dan “Tidak Benar” ada usaha damai dari pihak keluarga karena antara Tergugat dan Penggugat hubungan baik-baik saja;

- f. Bahwa “Tidak Benar” adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga melainkan masih harmonis dan bahkan Tergugat masih menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada pendirian semula sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 1 April 2021 tersebut, dan menolak semua dalil bantahan Tergugat sebagaimana Jawaban tanggal 16 Mei 2021 tersebut, kecuali dalil bantahan yang diakui secara tegas;
- b. Bahwa Tergugat sebenarnya menyetujui adanya Perceraian ini, dan Penggugat pernah memohon untuk agar Tergugat tidak usah datang di waktu sidang dan Tergugat setuju namun diingkari;
- c. Menanggapi point 9, bahwa selama 5 tahun hidup berumah tangga hanya tahun 2021 ini Tergugat memberikan THR sebanyak RP. 3.000.000.00, - (tiga juta rupiah)

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun Replik nya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat

- b. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengada-ada tentang terjadinya pertengkaran setiap minggu nya, melainkan Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis hubungan rumah tangga sampai saat ini, serta hubungan rumah tangga sampai saat ini. Bahkan pada bulan Puasa Ramadhan tahun ini tepatnya tanggal 27 april 2021 selesai berbuka puasa antara Penggugat dan Tergugat serta anak dilanjutkan menuju ke Hotel Victoria Banjarmasin, yang mana setelah selesai sholat magrib antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim suami istri. Kemudian pada tanggal 1 mei 2021 tepatnya di Hotel Sejahtera Kota Rantau Kabupaten Tapin, antara Penggugat dan Tergugat juga masih melakukan hubungan intim suami istri.
- c. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti antara Tergugat dan Penggugat terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus yang membuat rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi. Melainkan sampai saat ini terbukti hubungan Tergugat dan Penggugat tetap harmonis dan layak di Pertahankan serta sampai saat ini hubungan intim suami istri (Hubungan Biologis) masih rutin berjalan.

Karena itu, demi keadilan dan kepastian Hukum Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, maka tidak terdapat serta terpenuhinya alasan bahwa terjadinya menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Maka dengan

alasan-alasan tersebut di atas berdasarkan fakta yang disampaikan bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat masih terwujud dan oleh karena itu Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, berkenan menolak memberikan talak 1 atau Raj'i kepada Penggugat.

2. Kasus Posisi Penggugat

- a. Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar yang sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti
- b. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja dan masih tetap harmonis.
- c. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan antara lain selama proses persidangan Tergugat dan Penggugat sampai ini terbukti hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tetap harmonis dan layak di pertahankan serta sampai saat ini hubungan intim suami istri (hubungan biologis) masih rutin berjalan.

3. Kasus Posisi Tergugat

- a. Bahwa Tergugat sangat menyayangkan keputusan yang diambil Penggugat untuk bercerai. Semestinya harus disadari olehnya bahwa perbuatannya tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan Gugatan Perceraian, yang menurut ajakan agama yang di imani nya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Istri (wanita) yang meminta kepada suami (laki-laki) nya untuk di cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga.” (HR. Abu Daud no. 2226, At-Turmudzi 1187 dan di shohihkan oleh Al Abani).

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبَانَا الْمُخْزُومِيُّ، - وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " الْمُتَنَزِّعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " . قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا

“Para istri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (laki-laki) nya, mereka itulah para istri (wanita) munafik.” (HR.Nasai 3461 dan di shohihkan oleh Al Abani).

- b. Bahwa Tergugat tetap berkeberatan jika harus bercerai dengan Penggugat. Hal mengajukan Gugatan Cerai kemungkinan hanya di landasi emosi sesaat oleh Penggugat dan Tergugat bisa memaklumi hal tersebut. Dan semoga Allah membukakan hati Penggugat bahwa

perceraian adalah hal yang banyak mendatangkan mudhorat baik untuk Penggugat dan Tergugat serta anak.

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian kedua belah pihak diupayakan mediasi melalui Hakim Mediator, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, juga tidak berhasil, kecuali masalah hadanah disepakati dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat yang mendalilkan rumah tangganya masih baik-baik dan Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dengan bukti surat Detail Pembayaran Hotel dan *Screen Shoot* (T.8), dan Mutasi Rekening (T.9) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.bg dan Pasal 301 R.Bg , yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, namun dalam sengketa keluarga yang perlu dibuktikan adalah suatu peristiwa, sehingga harus ditambah dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat tidak dapat membuktikan pada batas minimal pembuktian bantahannya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
- b. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya
- c. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang terjadi selama persidangan baik gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan;

B. Analisis Putusan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Setelah penulis menguraikan putusan pada nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam pertimbangannya. Akan tetapi hal yang menjadi menarik dalam penelitian ialah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan adalah dengan terpenuhinya Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga didukung dengan hasil mediasi yang tidak berhasil dilakukan oleh Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selama proses mediasi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara lisan dan saat ini rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan.

Selanjutnya, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat.

Jika ditinjau dari segi pertimbangan hukum Majelis Hakim nampak bersesuaian dengan ketentuan dasar pertimbangan dalam perceraian. Hal ini

mengingat bahwa perselisihan terus menerus merupakan salah satu alasan yang menjadi legal standing untuk melakukan gugat cerai.

Dan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Mengenai penguatan dalil gugatan nya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUHPerdara, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan.

Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama SAKSI I dan SAKSI II saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Dilihat dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) R.Bg.

Berkenaan dengan alat bukti, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat yang mendalilkan rumah tangganya masih baik-baik dan Tergugat

masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dengan bukti surat Detail Pembayaran Hotel dan Screen Shoot (T.8), dan Mutasi Rekening (T.9) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut Volledig en Bindende Bewijskracht, namun dalam sengketa keluarga yang perlu dibuktikan adalah suatu peristiwa, sehingga harus ditambah dengan keterangan saksi-saksi;

Selain itu, terdapat fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Jadi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Serta dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi Saw yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرر

“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi¹:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Selanjutnya, dalam pertimbangan Majelis segala hal-hal yang terjadi selama persidangan baik gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan.

2. Analisis Yuridis Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Hal yang menarik menurut penulis dalam pertimbangan Hakim pada putusan ini bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal yang tidak relevan, sehingga Majelis menganggap tidak perlu dipertimbangkan. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan alasan yang kuat dalam menganggap pertimbangan lain yang tidak relevan dalam putusan ini.

Salah satu hal yang menurut penulis kurang dipertimbangkan tersebut ialah perihal Penggugat dan Tergugat yang masih melakukan hubungan badan

¹ Jalaluddin Al-Suyuthi, “Al-Ashbāh Wa Al-Nazāir,” 1983, 62.

selama masa persidangan. Artinya, masih ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat berdamai kembali dengan dilakukannya hubungan badan tersebut. Kemudian hal ini pada dasarnya didukung oleh pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa salah satu bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat detail pembayaran hotel dan screen shoot (T.8) yang diajukan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim dinilai sebagai bukti autentik sesuai dengan pasal 284 R.Bg dan pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *volledig en Bindende Bewijskracht*.

Sehingga nampak kurang elok ketika Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini dengan alasan jika pertimbangan ini tidak relevan sedangkan Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti yang diajukan adalah bukti autentik serta dinilai sempurna dan mengikat.

Berkenaan dengan alat bukti autentik yang diatur dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 R.Bg yang berbunyi “Akta autentik , yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.”² Oleh

² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005), 38.

karena itu terdapat kekeliruan ketika Majelis Hakim menganggap bahwa fakta dan bukti sebagaimana yang penulis jelaskan tidak relevan.

Memperhatikan bahwa ketika terjadinya hubungan badan artinya masih ada rasa suka sama suka atau keikhlasan dalam melakukan hubungan badan tersebut, sehingga munculnya rasa suka sama suka tersebut dapat menjadi dasar perdamaian diantara kedua belah pihak serta sebagai bukti jika hubungan rumah tangga antara keduanya tetap harmonis dan layak di pertahankan.

Hubungan badan antara suami istri didukung dengan penjelasan Hakim Mediator bahwa antara kedua belah pihak masih melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali selama masa persidangan berlangsung, yaitu tepatnya tanggal 27 april 2021 kemudian pada tanggal 1 mei 2021 di dua tempat berbeda. Kemudian hubungan badan ini juga didukung oleh kasus posisi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan atau hubungan intim rutin selama masa persidangan.

Jika ditinjau dari pendapat Majelis Hakim yang menganggap beberapa fakta dan bukti dalam gugatan ini tidak relevan ini dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”

Terkait dengan penjelasan diatas sesuai Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg yang berbunyi “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”, dan Pasal 50 Rv yang berbunyi “Para Hakim dalam musyawarahnya

karena jabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak. Mereka wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut. Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Ini memberikan penjelasan jika Majelis Hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa serta mengadili putusan dari setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.³

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.